EFEKTIVITAS ORGANISASI DINAS KESEHATAN DALAM PENURUNAN *STUNTING* DI KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Yonathan Firdaus
NPP. 33.0765
Asdaf Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah
Email: jonathan79009@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Drs. Suripto, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *This study was motivated by the failure to achieve the stunting prevalence target in Palangka Raya City, where the rate remains at 19.1% while the national target is 14%. This situation indicates the presence of operational challenges and structural institutional barriers.* ***Purpose:*** *To analyze and determine the organizational effectiveness of the Palangka Raya City Health Department in implementing the stunting reduction program.* ***Method:*** *Descriptive qualitative using a post-positivist approach. Data were collected through observation, documentation, and in-depth interviews with 9 informants, then analyzed using the Miles and Huberman model. Organizational effectiveness was assessed based on Richard M. Steers' theory, which encompasses the dimensions of goal achievement, integration, and adaptation.* ***Result:*** *The Palangka Raya City Health Office operates fairly effectively, characterized by structured planning, clear legal foundations, regular outreach through Posyandu, staff/cadre orientation, and adequate facilities and infrastructure. However, effectiveness is not yet optimal due to the slow change in community child-rearing behaviors, uneven training of staff, and limited operational budgets.* ***Conclusion:*** *Organizational effectiveness is already quite effective but requires continuous optimization through increased community participation, equitable human resource training, and strengthened program support in the field.*
Keywords: *Organizational Effectiveness, Stunting Reduction, Health Office, Palangka Raya City*

ABSTRAK

Permasalahan: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum tercapainya target prevalensi stunting di Kota Palangka Raya, di mana angkanya masih berada pada 19,1% sementara target nasional sebesar 14%. Kondisi ini mengindikasikan adanya kendala operasional dan hambatan struktural institusional. **Tujuan:** Menganalisis dan mengetahui efektivitas organisasi Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya dalam pelaksanaan program penurunan stunting. **Metode:** Kualitatif deskriptif dengan pendekatan post-positivisme. Data dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam terhadap 9 informan, lalu dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman. Efektivitas organisasi

dinilai berdasarkan teori Richard M. Steers yang mencakup dimensi pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. **Hasil/Temuan:** Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya berjalan cukup efektif, ditandai dengan perencanaan terstruktur, dasar hukum jelas, sosialisasi berkala melalui Posyandu, orientasi petugas/kader, dan sarana prasarana memadai. Namun, efektivitas belum optimal akibat lambatnya perubahan perilaku pola asuh masyarakat, belum meratanya pelatihan petugas, dan keterbatasan anggaran operasional. **Kesimpulan:** Efektivitas organisasi sudah cukup efektif namun memerlukan optimalisasi berkelanjutan melalui peningkatan partisipasi masyarakat, pemerataan pelatihan SDM, dan penguatan dukungan program di lapangan.

Kata Kunci: Efektivitas Organisasi, Penurunan *Stunting*, Dinas Kesehatan, Kota Palangka Raya

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara filosofis menegaskan bahwa daerah otonom diberikan hak, wewenang, sekaligus tanggung jawab penuh untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada prinsip desentralisasi yang mentransfer sebagian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mendekatkan jangkauan pelayanan publik. Berdasarkan regulasi tersebut, urusan pemerintahan dibagi menjadi urusan absolut, konkuren, dan umum, di mana urusan konkuren yang didistribusikan antara pusat dan daerah menjadi pilar utama penggerak pembangunan daerah nasional.

Dalam pembagian urusan konkuren, terdapat Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, salah satunya adalah bidang kesehatan. Kesehatan merupakan hak fundamental setiap warga negara sekaligus prasyarat utama pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM). Salah satu tantangan kesehatan nasional yang saat ini menjadi perhatian krusial dan agenda prioritas nasional adalah percepatan penurunan stunting. Stunting, atau kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, bukan sekadar masalah tinggi badan, melainkan ancaman terhadap kapasitas kognitif, produktivitas generasi masa depan, dan daya saing bangsa di era global.

Pemerintah pusat telah menetapkan target agresif melalui Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN-PASTI), dengan target prevalensi stunting nasional turun menjadi 14%. Target ini menuntut komitmen radikal dan langkah terintegrasi dari seluruh tingkatan pemerintahan, khususnya pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota sebagai ujung tombak eksekusi kebijakan di lapangan. Namun, potret nyata di lapangan menunjukkan adanya disparitas yang signifikan antara target makro nasional dengan capaian di tingkat lokal. Lokus penelitian ini berada di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan rilis data empiris, angka prevalensi stunting di Kota Palangka Raya masih berada pada angka 19,1%.

Sebagai instansi kelola lini depan (*line agency*) yang memegang urusan wajib pelayanan dasar kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya memiliki posisi strategis untuk mengoordinasikan intervensi gizi spesifik (terkait penanganan langsung pada ibu hamil dan balita) serta mengawal

intervensi gizi sensitif (terkait penyediaan air bersih, sanitasi, dan edukasi masyarakat). Keberhasilan program ini sangat bergantung pada bagaimana Dinas Kesehatan menggerakkan struktur internalnya, beradaptasi dengan keterbatasan yang ada, serta mengintegrasikan gerak langkah dengan kader kesehatan di lapangan.

Fenomena di lapangan mengindikasikan adanya fluktuasi kinerja institusi. Di satu sisi, regulasi, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan perencanaan program penurunan stunting telah dibentuk secara tertulis. Namun di sisi lain, hasil di tingkat riil belum berbanding lurus dengan dokumen perencanaan tersebut. Permasalahan seperti belum optimalnya perubahan perilaku masyarakat dalam pola asuh, belum meratanya kapasitas pelatihan bagi tenaga pelaksana (seperti kader Posyandu), kendala alokasi anggaran, hingga dinamika pergantian personel (*turnover*) menjadi hambatan nyata dalam implementasi program.

Melihat kompleksitas masalah di atas, keberhasilan penurunan stunting tidak lagi sekadar masalah teknis medis, melainkan masalah Efektivitas Organisasi pada instansi pengampunya. Sebuah organisasi publik dapat dikatakan efektif apabila mampu mencapai tujuan secara optimal, mengintegrasikan seluruh elemen internal dan eksternal, serta fleksibel dalam beradaptasi dengan hambatan lingkungan di lapangan. Untuk membedah permasalahan ini secara ilmiah, teori efektivitas organisasi dari Richard M. Steers dinilai sangat relevan untuk digunakan. Melalui tiga dimensi utamanya, yaitu pencapaian tujuan (*goal attainment*), integrasi (*integration*), dan adaptasi (*adaptation*), kualitas performa Dinas Kesehatan dapat diukur dan dievaluasi secara komprehensif.

Dengan latar belakang tersebut, guna mendalami sejauh mana instansi ini melaksanakan peran strategisnya di tengah hambatan operasional, maka penelitian ini dilakukan dengan judul: "Efektivitas Organisasi Dinas Kesehatan Dalam Penurunan Stunting di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah".

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan konkret berkaitan dengan efektivitas organisasi pelayanan di Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya saat ini. Faktor belum optimalnya perubahan perilaku masyarakat dalam menerapkan pola asuh dan pemenuhan gizi kronis merupakan salah satu hambatan mendasar. Cukup banyak lapisan masyarakat atau keluarga berisiko stunting di Kota Palangka Raya yang mengalami kesulitan untuk mengadopsi intervensi kesehatan secara mandiri karena keterbatasan kesadaran, rendahnya pemahaman, dan minimnya pendampingan berkala dari tenaga pelaksana di lapangan. Akibat keterbatasan finansial dan fasilitas penunjang ekonomi rumah tangga, sebagian besar keluarga rentan masih memilih mengabaikan pemenuhan gizi spesifik, yang berisiko memunculkan hambatan dalam akselerasi penurunan prevalensi stunting secara makro.

Kurangnya pemerataan jangkauan kapasitas dan sebaran kualitas pelatihan bagi tenaga kesehatan serta kader Posyandu di beberapa wilayah kerja Puskesmas se-Kota Palangka Raya juga menjadi permasalahan berikutnya. Masalah kompetensi SDM komunikasi dan edukasi ini mengakibatkan asas pemerataan informasi pelayanan intervensi gizi tidak berjalan optimal, di mana para kader di wilayah pinggiran atau lokus tertentu kerap tertinggal informasi mengenai pemutakhiran metode penanganan stunting terbaru. Fenomena ini diperparah oleh adanya keterbatasan anggaran operasional serta tingginya resistensi dinamika internal berupa pergantian tenaga pelaksana (*turnover*) di lini lapangan; sebagian kader atau petugas teknis baru cenderung merasa kurang siap dan

membutuhkan waktu penyesuaian yang lama ketimbang memanfaatkan kapasitas sistem koordinasi yang ada. Hal ini mengindikasikan adanya celah (*gap*) implementasi yang nyata dan asimetri capaian antara target makro nasional penurunan stunting sebesar 14% dengan realisasi prevalensi di lapangan yang faktanya masih tertahan pada angka 19,1% di Kota Palangka Raya.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengacu pada beberapa studi terdahulu yang relevan dalam konteks evaluasi program, manajemen pelayanan kesehatan publik, serta efektivitas institusi dalam menanggulangi masalah stunting di tingkat daerah. Telaah terhadap penelitian-penelitian ini berfungsi sebagai pijakan teoretis dan metodologis untuk mempertegas posisi serta kontribusi ilmiah dari penelitian yang dilakukan.

Penelitian pertama dilakukan oleh (Zizi et al., 2023)dengan judul *"Efektivitas Program Percepatan Penurunan Stunting di Kepulauan Riau"*. Penelitian ini bertujuan untuk menilai pelaksanaan program oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau menggunakan metode studi literatur dengan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program secara regulasi telah berjalan cukup baik, namun capaian target belum sepenuhnya optimal akibat terbentur hambatan struktural sosiologis masyarakat, seperti rendahnya tingkat pendidikan keluarga, kondisi ekonomi rumah tangga, serta minimnya pengetahuan mengenai pola asuh anak. Kesamaan dengan penelitian penulis terletak pada fokus objek organisasi penanggung jawab utama, yaitu Dinas Kesehatan.

Penelitian kedua dilakukan oleh Norsanti (2021) dengan judul *"Efektivitas Program Percepatan Penurunan Stunting di Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan (Studi Kasus Pada Desa Mampari dan Desa Banua Hanyar)"*. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengevaluasi kinerja program di tingkat akar rumput. Hasil penelitian menemukan adanya fluktuasi keberhasilan program yang dipengaruhi oleh tingkat kesadaran masyarakat dan kompetensi kader posyandu setempat. Kesamaannya dengan penelitian penulis terletak pada penggunaan metode kualitatif deskriptif untuk mengevaluasi program penurunan stunting pada tingkat lokal.

Penelitian ketiga dilakukan oleh (Nuryani & Mashur, 2024) dengan judul *"Efektivitas Program Percepatan Penurunan Stunting Di UPTD Puskesmas Kilan Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu"*. Penelitian ini bertujuan mengukur sejauh mana unit pelaksana teknis kesehatan mampu mengimplementasikan program intervensi stunting. Hasil penelitian menyoroti pentingnya keandalan operasional petugas klinis dan ketersediaan sarana antropometri dalam pemantauan gizi buruk. Kesamaannya terletak pada fokus kajian yang mengevaluasi instansi pelaksana pelayanan kesehatan di lapangan beserta faktor pendorong dan penghambatnya.

Penelitian keempat dilakukan oleh Hasnawati et al. (2023) dengan judul *"Efektivitas Program Percepatan Penurunan Stunting di Kota Baubau"*. Riset ini mengevaluasi kinerja penanganan stunting pada karakteristik wilayah perkotaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi lintas sektor dan kestabilan alokasi anggaran menjadi determinan utama keberhasilan pencapaian target penurunan angka prevalensi stunting daerah. Kesamaannya terletak pada kemiripan karakteristik lokus penelitian, yaitu berfokus pada wilayah pemerintahan tingkat Kota.

Penelitian kelima dilakukan oleh Bekti Handayani (2024) dengan judul *"Efektivitas Konvergensi Program Intervensi Percepatan Penurunan Stunting di Tingkat Keluarga"*. Penelitian ini berfokus pada luaran aksi konvergensi intervensi gizi spesifik dan sensitif langsung pada sasaran rumah tangga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan penurunan stunting sangat ditentukan oleh keterpaduan sosialisasi dan perubahan perilaku pengasuhan di tingkat keluarga. Kesamaannya terletak pada penggunaan konsep efektivitas dan fokus intervensi pada periode *Golden Age* (balita).

Berdasarkan pemaparan lima penelitian terdahulu di atas, penulis merancang penelitian ini dengan menyajikan beberapa aspek perbedaan mendasar yang sekaligus menjadi eviden kebaruan ilmiah (*novelty*). Dari segi teoretis, jika mayoritas studi sebelumnya menempatkan variabel efektivitas program untuk mengukur output di level desa/puskesmas secara parsial, seperti studi Norsanti dan Eka Nuryani, sekadar tinjauan literatur makro, seperti studi (Zizi et al., 2023), atau intervensi tingkat keluarga oleh studi Bekti Handayani, penelitian ini memosisikan kapasitas internal Efektivitas Organisasi Dinas Kesehatan itu sendiri sebagai instansi pengampu utama (*line agency*) yang ditelaah secara menyeluruh berdasarkan model komprehensif Richard M. Steers. Dari segi metodologis, penulis menggunakan data primer dan sekunder melalui pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi terstruktur, serta triangulasi sumber dokumen operasional langsung pada unit birokrasi perkotaan.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian dengan lokus, kombinasi dimensi, dan arah orientasi yang berbeda dari penelitian terdahulu. Ketika penelitian terdahulu seperti studi (Zizi et al., 2023), Norsanti (2021), dan Hasnawati et al. (2023) menitikberatkan pengujian indikator evaluasi program secara umum untuk menilai tingkat keberhasilan output stunting di tingkat wilayah secara parsial, penelitian ini melakukan langkah kebaruan dengan menempatkan kapasitas internal Efektivitas Organisasi Dinas Kesehatan itu sendiri sebagai fokus dan variabel dependen utama yang ditelaah secara menyeluruh.

Penulis menguji bagaimana instrumen dimensi Pencapaian Tujuan, Integrasi, dan Adaptasi berdasarkan teori Richard M. Steers secara simultan membentuk dan mengonstruksi derajat efektivitas institusi di tingkat organisasi perangkat daerah perkotaan, seperti Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya. Pendekatan kualitatif deskriptif dengan paradigma post-positivisme melalui teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi lapangan, serta triangulasi sumber dokumen operasional dalam penelitian ini menyajikan kedalaman analisis sosiologis-birokratis yang melengkapi analisis kuantifikasi makro atau studi literatur sekunder dari penelitian-penelitian sebelumnya.

Langkah kebaruan ini dipertegas oleh serangkaian eviden pembeda komprehensif yang memisahkan penelitian ini dengan studi-studi terdahulu dari berbagai aspek fundamental. Dari segi teoretis, penelitian ini memperluas orientasi teori Richard M. Steers untuk membedah pola koordinasi struktural pada level instansi pengampu daerah (*line agency* tingkat kota), berbeda dengan tren penelitian terdahulu yang mayoritas hanya menggunakan analisis evaluasi kebijakan publik model deskriptif umum tanpa pisau analisis organisasi yang spesifik. Perbedaan tersebut diperkuat secara metodologis di mana penulis mengandalkan penggalian data primer kualitatif secara mendalam melalui teknik wawancara berlapis yang melibatkan informan dari tingkat Dinas Kesehatan, UPTD Puskesmas, kader kesehatan, hingga masyarakat penerima manfaat; sebuah pendekatan yang kontras dengan studi (Zizi et al., 2023) yang murni mengandalkan data sekunder berbasis studi literatur. Selanjutnya, jika ditinjau dari aspek kebijakan, fokus operasionalisasi dalam riset ini diarahkan langsung pada efektivitas birokrasi dalam mengeksekusi Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN-PASTI) di tingkat kota otonom, yang secara substantif berbeda dengan

studi Handayani (2024) yang menitikberatkan pada analisis konvergensi perilaku di unit keluarga terkecil. Akhirnya, aspek karakteristik objek dan lokus menjadi pembeda paling fundamental dalam penelitian ini. Alih-alih mengambil lokus wilayah pedesaan kabupaten yang mendominasi studi stunting pada umumnya, seperti studi Norsanti di Balangan dan Eka Nuryani di Indragiri Hulu, penelitian ini dilaksanakan di Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Karakteristik wilayah *urban-suburban* ini membawa tantangan sosiologis sekaligus birokratis yang unik, seperti fluktuasi perilaku pola asuh masyarakat perkotaan, belum meratanya pelatihan kader Posyandu antar-Puskesmas seperti kasus di UPTD Puskesmas Kayon, kendala periodik anggaran operasional, hingga tingginya pergantian tenaga pelaksana (*turnover*) di lini lapangan. Oleh karena itu, studi ini menjadi eviden penting untuk menguji kapasitas adaptasi birokrasi dalam mengejar celah (*gap*) angka prevalensi stunting yang saat ini masih bertahan pada angka 19,1% menuju target nasional sebesar 14% di Kota Palangka Raya.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, membuktikan, dan memperoleh gambaran empiris yang jelas mengenai efektivitas organisasi Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya dalam penurunan stunting berdasarkan dimensi pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi di Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Metode ini digunakan untuk menganalisis dan mendalami fenomena mengenai efektivitas organisasi institusi terhadap capaian penurunan stunting melalui dimensi pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Pengumpulan data primer dilakukan melalui teknik wawancara semi-terstruktur dan observasi lapangan secara langsung, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumentasi terhadap regulasi kebijakan, standar operasional prosedur, dan dokumen laporan kinerja resmi institusi.

Informan dalam penelitian ini mencakup unsur struktural dinas, tenaga kesehatan, pelaksana teknis lapangan, hingga masyarakat sasaran yang dipilih secara *purposive sampling* dengan kriteria keterlibatan langsung dalam program minimal satu tahun, yakni sebanyak 9 informan representatif. Lokus observasi lapangan dilaksanakan pada tiga titik operasional meliputi Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya, Puskesmas Kayon, dan Posyandu Anggrek dalam rentang waktu Januari 2026. Teknik analisis data yang diterapkan adalah analisis model interaktif melalui tiga tahapan berkesinambungan yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penjaminan keabsahan hasil temuan dilakukan secara komputerisasi dan konseptual melalui triangulasi sumber data untuk memeriksa konsistensi informasi dengan memadukan hasil wawancara, observasi, dan dokumen resmi institusi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis efektivitas organisasi Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya dalam penurunan stunting menggunakan dimensi pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi yang diolah secara empiris. Pembahasan hasil pengujian dijabarkan pada subbab berikut.

3.1. Pencapaian Tujuan

Dimensi pencapaian tujuan dalam penelitian ini dinilai melalui tiga indikator: kurun waktu pencapaian yang ditentukan, sasaran/target yang terukur, dan dasar hukum. Secara keseluruhan, dimensi ini menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya telah beroperasi secara efektif dalam aspek pencapaian tujuan.

Pertama, terkait kurun waktu pencapaian, Sekretaris Dinas Kesehatan, dr. Octavines S.K. Tarigan, M.Kes., menyatakan bahwa seluruh program intervensi spesifik mulai dari pelayanan remaja putri, ibu hamil, ibu menyusui, hingga bayi dan balita dilaksanakan secara terjadwal dan berkelanjutan sesuai perencanaan. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Nur Ainawaiyah, SKM., M.Si., menjelaskan bahwa setiap awal tahun Dinas Kesehatan menyusun perencanaan kegiatan yang terukur dan terjadwal, meskipun pencairan anggaran yang baru dapat digunakan sekitar bulan Maret kadang menjadi penyebab keterlambatan teknis. Keterlambatan pencairan ini secara makro mengonfirmasi analisis dari (Tahir et al., 2024) mengenai kontribusi pengeluaran pemerintah (*government expenditure*), di mana efektivitas pencapaian target pembangunan manusia dan reduksi prevalensi stunting sangat bergantung pada ketepatan waktu (*timing*) dan efisiensi penyerapan anggaran fiskal daerah. Selain itu, hambatan teknis penganggaran di awal tahun ini selaras dengan model implementasi kebijakan dalam tata kelola desentralisasi menurut (Tahir, et al., 2025) ,yang menyatakan bahwa keberhasilan *human development* di tingkat lokal sering kali tersandera oleh rantai birokrasi penyerapan anggaran daerah yang kurang fleksibel. Meskipun demikian, observasi terhadap Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) Gizi Tahun 2025 Puskesmas Kayon mengkonfirmasi adanya distribusi jadwal kegiatan yang terstruktur dari Januari hingga Desember, meliputi pemberian tablet besi kepada remaja putri di 13 SMP/SMA, pelayanan Posyandu bulanan di 20 titik, kunjungan lapangan pemantauan tumbuh kembang di 732 lokasi, serta kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbahan pangan lokal. Dengan demikian, indikator kurun waktu pencapaian dapat dinilai telah berjalan efektif.

Kedua, berkaitan dengan sasaran/target yang terukur, Dinas Kesehatan mengacu pada target nasional yang tertuang dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2021, yaitu penurunan angka stunting hingga 14%. Ketua Tim Kerja Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat, Marsudi Damar Jati, S.Kep., menyatakan bahwa target pemerintah pusat untuk tahun 2025 sebesar 18,8% dinilai realistis mengingat capaian tahun 2024 telah berada pada angka 19,1%. Observasi terhadap dokumen Sasaran Program Dinas Kesehatan Tahun 2025 menunjukkan penetapan sasaran yang terperinci berdasarkan kecamatan dan Puskesmas, meliputi ibu hamil, bayi, dan balita. Dengan total sasaran ibu hamil sebanyak 5.798 orang dan sasaran bayi 6–11 bulan sebanyak 3.008 orang se-Kota Palangka Raya, penetapan sasaran yang sistematis ini menunjukkan bahwa program memiliki target yang spesifik dan dapat diukur. Indikator sasaran/target terukur dinilai telah berjalan efektif.

Ketiga, mengenai dasar hukum, pelaksanaan program penurunan stunting di Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya telah berlandaskan regulasi yang lengkap dan berjenjang: Perpres Nomor 72 Tahun 2021, Permenkes Nomor 29 Tahun 2019, Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 22 Tahun 2023, dan Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 41 Tahun 2023. Di tingkat operasional, seluruh pelayanan dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mencakup pemberian tablet penambah darah, imunisasi, PMT, dan pemantauan tumbuh kembang anak. Meskipun kendala utama berada pada tingkat partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan,

dasar hukum sebagai pedoman pelaksanaan tidak terganggu. Indikator dasar hukum dinilai telah berjalan efektif.

3.2. Integrasi

Dimensi integrasi mencakup kemampuan organisasi dalam membangun kerja sama, komunikasi, dan koordinasi dengan berbagai pihak, yang dinilai melalui indikator prosedur sosialisasi dan proses sosialisasi.

Pertama, prosedur sosialisasi di Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya tidak berdiri sebagai satu SOP khusus tersendiri, melainkan terintegrasi dalam berbagai program pendukung seperti pemantauan tumbuh kembang, perbaikan gizi, pola asuh, dan imunisasi. Kepala Puskesmas Kayon, Hj. Harta, A.Md.Keb., SKM., M.Kes., menjelaskan bahwa setiap Puskesmas memiliki SOP khusus yang memuat dasar hukum, pelaksana, serta penanggung jawab kegiatan, hal ini dimungkinkan karena seluruh Puskesmas telah terakreditasi. Observasi terhadap dokumen SOP Komunikasi dan Koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor UPTD Puskesmas Kayon mengonfirmasi adanya alur kegiatan yang jelas mulai dari koordinasi, penyampaian informasi, pelaksanaan pertemuan lintas sektor, hingga pengambilan kesepakatan bersama. SOP berperan penting sebagai acuan kerja yang memiliki ukuran jelas, memudahkan penelusuran kesalahan, dan dapat direvisi sesuai perubahan aturan. Indikator prosedur sosialisasi dinilai efektif. Keberadaan SOP Komunikasi dan Koordinasi Lintas Sektor di UPTD Puskesmas Kayon ini merupakan bentuk nyata dari transisi tata kelola pemerintahan, dari yang semula bersifat kaku (*parallel governance*) menuju tata kelola kemitraan (*partnership governance*). Sebagaimana ditegaskan oleh Supranoto et al. (2025), penguatan sinergi institusional antar-aktor lokal merupakan kunci utama dalam mengakselerasi penurunan stunting di era desentralisasi Indonesia. Konvergensi administratif berbasis SOP ini juga merefleksikan argumen dari (Tahir, Martini, et al., 2025) bahwa pemanfaatan transformasi digital dan keterbukaan tata kelola publik (*public governance*) secara langsung mampu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi eksekusi program kesehatan di tingkat tapak.

Kedua, proses sosialisasi dilaksanakan secara berkelanjutan melalui pendekatan siklus kehidupan, dimulai sejak remaja putri, ibu hamil, ibu menyusui, hingga anak usia balita khususnya pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan. Tenaga Gizi Puskesmas Kayon, Anastasia Evi Wahyuni, AMG, menjelaskan bahwa materi yang disampaikan relatif mudah dipahami karena petugas telah dibekali pelatihan komunikasi yang efektif. Kader Posyandu ILP Manjuhan Sehat menyatakan bahwa sosialisasi secara tatap muka lebih efektif karena dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing anak dan keluarga. Dari sisi penerima manfaat, Ibu Setyorini dan Ibu Yuni selaku orang tua balita terdampak

Stunting mengapresiasi bahwa informasi yang disampaikan menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan bermanfaat untuk mengatur pola makan dan kebersihan lingkungan. Namun, Ibu Rina mengakui bahwa menerapkan informasi dalam kehidupan sehari-hari tidak selalu langsung berhasil karena kebiasaan lama yang sulit diubah. Observasi pada kegiatan Posyandu Anggrek mengonfirmasi bahwa sosialisasi dilaksanakan secara aktif dan komunikatif melalui penimbangan balita, penyuluhan gizi, dan konsultasi personal. Indikator proses sosialisasi dinilai cukup efektif, meskipun belum sepenuhnya optimal dalam mengubah perilaku masyarakat.

3.3. Adaptasi

Dimensi adaptasi menilai kemampuan organisasi dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan melalui peningkatan kemampuan SDM dan dukungan sarana serta prasarana.

Pertama, peningkatan kemampuan SDM dilakukan melalui pelatihan rutin bagi kader Posyandu dan tenaga kesehatan. Sekretaris Dinas Kesehatan menegaskan bahwa pelatihan diberikan kepada kader dan tenaga medis seperti bidan, dokter, dan tenaga kesehatan lainnya agar bekerja sesuai kompetensi yang dimiliki, bukan secara asal. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat menjelaskan bahwa kader dilatih untuk mampu memantau pertumbuhan anak, melakukan pengukuran status gizi dengan benar, dan menyampaikan edukasi gizi kepada masyarakat. Observasi terhadap dokumentasi kegiatan Orientasi Komunikasi Antar Pribadi (KAP) Pencegahan Stunting bagi Petugas dan Kader Kesehatan mengonfirmasi bahwa Dinas Kesehatan secara aktif menyelenggarakan pembekalan untuk memperkuat kapasitas SDM. Namun demikian, masih terdapat kendala berupa belum meratanya pelatihan kepada seluruh kader, keterbatasan anggaran pelatihan, dan pergantian tenaga pelaksana yang menyebabkan kebutuhan pembekalan berulang. Indikator peningkatan kemampuan SDM dinilai cukup efektif namun masih memerlukan optimalisasi. Fenomena fluktuasi kapasitas SDM dan tingginya *turnover* kader ini paralel dengan temuan Sufri et al. (2024) di Kabupaten Pidie, Aceh, yang menunjukkan bahwa keberhasilan luaran (*outcomes*) kebijakan konvergensi stunting di lapangan sering kali dihambat oleh lemahnya kontinuitas kapasitas instruksional pelaksana di tingkat desa. Oleh karena itu, dalam menghadapi era transformasi pelayanan, kapasitas adaptasi organisasi tidak hanya diukur dari pelatihan konvensional, melainkan juga dari kesiapan adopsi inovasi. Sebagaimana dikaji oleh (Wargadinata, 2026) mengenai *ruralite acceptance* terhadap teknologi kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), kemampuan kader dan masyarakat dalam menerima serta mengoperasikan instrumen digital baru menjadi prasyarat mutlak agar fleksibilitas institusi dalam merespons hambatan di lapangan tetap berjalan optimal.

Kedua, ketersediaan sarana dan prasarana dinilai sudah memadai. Ketua Tim Kerja Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat menyatakan bahwa PMT berbasis pangan lokal tersedia dengan dana langsung dari Kementerian, formula makanan khusus untuk gizi buruk didistribusikan ke Rumah Sakit, dan tablet penambah darah disalurkan melalui Dinas Kesehatan ke Puskesmas sesuai target kebutuhan masing-masing. Kepala Puskesmas Kayon mengkonfirmasi bahwa sarana dan prasarana cukup lengkap, mulai dari fasilitas kesehatan, alat ukur antropometri, hingga PMT. Tenaga Gizi Puskesmas Kayon menambahkan bahwa sarana di Puskesmas Kayon sudah sangat mendukung tanpa kerusakan alat. Observasi terhadap kegiatan pengukuran tinggi badan di Posyandu mengkonfirmasi pemanfaatan alat antropometri dalam pemantauan tumbuh kembang secara langsung. Kendala yang masih dihadapi lebih berkaitan dengan keterbatasan jumlah beberapa alat pendukung, namun kondisi ini tidak menghambat pelaksanaan program secara keseluruhan. Indikator ketersediaan sarana dan prasarana dinilai efektif.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Subbab ini khusus membahas perbandingan mendalam antara temuan empiris yang diperoleh penulis dengan khazanah penelitian terdahulu yang relevan. Melalui komparasi kritis ini, dapat

dipetakan secara jelas posisi teoretis dan kontribusi empiris dari hasil penelitian di Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya dibandingkan dengan lokus-lokus penelitian lainnya.

Pertama, pada dimensi Pencapaian Tujuan, hasil analisis kualitatif dalam model ini menunjukkan bahwa kejelasan sasaran merupakan faktor yang paling dominan membentuk efektivitas organisasi di Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya dengan ketepatan instrumen kurun waktu, target terukur, dan landasan hukum operasional yang berjalan optimal. Temuan dominansi ini secara empiris sangat sejalan dan menguatkan kajian terdahulu di Kepulauan Riau yang sama-sama mengonfirmasi peran krusial dari instrumen penentuan target regulasi makro oleh Dinas Kesehatan dalam mengawal keberhasilan penekanan angka stunting. Persamaan substansial ini membuktikan bahwa komitmen institusi untuk menetapkan sasaran terperinci secara sistematis (seperti target sasaran 5.798 ibu hamil dan 3.008 bayi) merupakan fondasi utama dari keberhasilan program, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kota. Signifikansi ketetapan tujuan tata kelola ini senada pula dengan studi ekosistem penanganan kesehatan makro yang mendahulukan kejelasan regulasi berjenjang (Perpres Nomor 72 Tahun 2021 dan Perwal Nomor 41 Tahun 2023) sebagai parameter utama akuntabilitas kelembagaan publik.

Kedua, perbedaan hasil yang menarik ditemukan pada dimensi Integrasi. Di satu sisi, hasil evaluasi di Kecamatan Lampihong menemukan bahwa indikator perencanaan, evaluasi, dan realisasi strategi program stunting di lapangan tergolong kurang efektif akibat lemahnya komitmen taktis kelembagaan lokal. Namun, dalam penelitian di Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya ini, dimensi Integrasi teruji secara empiris memiliki capaian yang cukup efektif melalui keberadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Komunikasi dan Koordinasi Lintas Sektor yang berjalan aktif pada level UPTD Puskesmas Kayon dan kegiatan Posyandu Anggrek. Kontras hasil ini terjadi karena adanya perbedaan tata kelola pada instansi pelaksana. Jika pada studi Lampihong integrasi program terhambat oleh realisasi kegiatan di tingkat desa, pada penelitian ini integrasi diperkuat oleh status Puskesmas yang telah terakreditasi sehingga memiliki alur koordinasi dan instrumen edukasi yang jauh lebih mapan. Kondisi ini memberikan kontribusi komparatif yang menarik jika disandingkan dengan potret penanganan stunting di wilayah lain. Di Kabupaten Garut, Ipa et al. (2023) menemukan bahwa lemahnya pembagian peran *stakeholders* memicu tumpang tindih ego sektoral yang menghambat program. Kontras dengan hal tersebut, koordinasi di Kota Palangka Raya berjalan lebih terarah karena dipandu oleh kejelasan lokus tugas birokrasi tingkat kota. Keberhasilan pengoperasian koordinasi lintas sektor ini juga menguatkan hasil studi kebijakan di Kabupaten Majene oleh (Rahmah et al., 2025), yang mengonfirmasi bahwa efektivitas penurunan *stunting* di daerah otonom sangat ditentukan oleh ketegasan *line agency* dalam memimpin aksi konvergensi lintas institusi. Secara kontekstual di Kota Palangka Raya, pelaksanaan sosialisasi secara aktif melalui pendekatan siklus kehidupan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) terbukti menjadi instrumen penggerak yang mampu menjembatani arus informasi dari petugas klinis kepada masyarakat sasaran.

Selanjutnya, dimensi Adaptasi dalam penelitian ini teruji berjalan cukup efektif namun mencatat nilai capaian yang paling rendah dibandingkan dimensi lainnya. Temuan mengenai keterbatasan aspek adaptasi ini paralel dan mendukung penuh kesimpulan dari studi kasus terdahulu yang menyatakan bahwa efektivitas program di lini lapangan sering kali terhambat oleh masalah kedisiplinan dan kompetensi tenaga pelaksana serta minimnya partisipasi aktif masyarakat. Keberadaan sarana penunjang seperti alat antropometri dan paket PMT berbasis pangan lokal di Puskesmas Kayon

sebenarnya sudah memadai, namun kapasitas adaptasi organisasi terganggu oleh belum meratanya pelatihan komunikasi antar-pribadi serta tingginya dinamika pergantian tenaga pelaksana (*turnover* kader). Hal tersebut selaras dengan fakta evaluasi program kesehatan daerah bahwa pemenuhan fasilitas fisik yang memadai wajib diimbangi dengan stabilitas dan pembekalan berkala sumber daya manusia agar fleksibilitas institusi dalam merespons hambatan di lapangan tetap terjaga sebagai penentu kelayakan teknis yang fundamental bagi keberlanjutan sistem kerja.

Terakhir, komparasi kritis dilakukan terhadap hasil evaluasi efektivitas program pencegahan stunting di UPT Puskesmas Kombo Kabupaten Tolitoli serta studi sejenis di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Studi-studi di lokus tersebut menyimpulkan bahwa dimensi pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi telah berjalan cukup efektif dengan dukungan kerja sama lintas sektor, namun dimensi integrasi khususnya terkait partisipasi ibu balita dan keterbatasan pengetahuan tentang pola asuh anak menjadi titik lemah utama yang mendesak untuk diperbaiki. Hasil penelitian ini berhasil melengkapi aspek substantif makro dari temuan tersebut. Model analisis dalam penelitian ini membuktikan secara ilmiah bahwa keluhan masyarakat atas masih adanya hambatan perubahan perilaku seolah-olah berjalan lambat sejatinya berakar dari derajat efektivitas operasional sistem kerja birokrasi institusi pengampunya. Ketika tiga dimensi dalam riset ini, yaitu kejelasan sasaran pencapaian tujuan, keandalan prosedur integrasi lintas sektor, serta fleksibilitas adaptasi peningkatan kapasitas SDM disinergikan, maka asimetri capaian yang menghambat akselerasi program dapat dipangkas. Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan sumbangan baru bahwa perbaikan mutu pelayanan kesehatan tidak dapat dicapai secara parsial, melainkan harus diintervensi dari hulu melalui penegakan efektivitas organisasi yang dibangun oleh sinergi aspek regulatori, sosiologis, dan manajerial institusi pada level organisasi perangkat daerah tingkat kota.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Meskipun hasil analisis menunjukkan pengaruh positif yang kuat, penulis menemukan beberapa faktor residu di lapangan yang berpotensi menghambat optimalisasi efektivitas organisasi dalam penurunan stunting. Faktor penghambat tersebut meliputi: masih terbatasnya tingkat perubahan perilaku dan resistensi kultural sebagian masyarakat dalam mengadopsi pola asuh sehat, belum meratanya cakupan pelatihan komunikasi antar-pribadi bagi seluruh kader Posyandu, serta tingginya tingkat pergantian tenaga pelaksana (*turnover* kader) di tingkat lapangan yang memicu kebutuhan pembekalan secara berulang. Hambatan pola asuh ini semakin kompleks jika ditinjau dari karakteristik sosiologis wilayah urban-suburban Kota Palangka Raya. Sebagaimana dikaji oleh Juniarti et al. (2025) di Jawa Barat, status sosiologis masyarakat perkotaan, khususnya ibu bekerja (*working mothers*) memiliki keterbatasan waktu pengasuhan yang signifikan, sehingga menjadi determinan utama yang menghambat efektivitas adopsi perilaku pencegahan stunting meskipun informasi medis telah diberikan. Secara global, hambatan demografis ini serupa dengan analisis spasial oleh Rashid et al. (2026) di Bangladesh, yang membuktikan adanya korelasi kuat antara prediktor sosiokultural wilayah pinggiran kota (*peri-urban*) dengan lambatnya perbaikan status gizi balita akibat ketimpangan pola intervensi spesifik dan sensitif. Hambatan kesadaran kearifan lokal masyarakat, ketimpangan kapasitas kompetensi antar-petugas, serta kendala periodik keterbatasan anggaran pelatihan ini merupakan potret umum transformasi tata kelola pelayanan kesehatan di negara berkembang. Pola hambatan struktural birokrasi lokal ini sering kali memicu kesenjangan implementasi antara regulasi

makro nasional dengan realisasi di lapangan. Selain itu, dinamika hambatan teknis akibat faktor fluktuasi data demografis di daerah pinggiran perkotaan ini menyerupai kompleksitas pelayanan publik daerah terpencil, di mana ketersediaan fasilitas penunjang yang belum merata serta jangkauan edukasi yang timpang memicu hambatan operasional dan informasi. Kondisi dilematis ini juga paralel dengan kenyataan bahwa efektivitas kebijakan pemerintah daerah sering kali terbentur oleh persoalan kesiapan anggaran operasional lapangan dan keterlambatan teknis pencairan anggaran di awal tahun anggaran (sekitar bulan Januari hingga Maret).

Apabila hambatan-hambatan residu ini dibiarkan tanpa adanya pendampingan intensif serta alokasi anggaran pelatihan kader yang mandiri dari institusi, maka kepercayaan masyarakat terhadap keseriusan pelayanan kesehatan publik dapat mengalami penurunan. Fenomena penurunan kemauan partisipatif publik akibat minimnya pemahaman ini berisiko menurunkan legitimasi serta kepercayaan masyarakat lokal terhadap jalannya program pemerintah.Sebagai solusi makro, komitmen institusi tingkat lokal sangat krusial dalam menata regulasi penganggaran yang inklusif serta memformulasikan strategi pembinaan kader yang terstruktur agar target penekanan angka prevalensi stunting dari angka 19,1% menuju target nasional sebesar 14% di Kota Palangka Raya dapat tercapai secara merata.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa efektivitas organisasi Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya dalam penurunan stunting telah berjalan cukup efektif berdasarkan dimensi pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Dimensi pencapaian tujuan berjalan efektif melalui perencanaan program yang terarah, target yang jelas, dan dukungan regulasi yang memadai. Dimensi integrasi berjalan cukup efektif melalui pelaksanaan sosialisasi dan koordinasi program yang berkelanjutan, meskipun perubahan perilaku masyarakat masih memerlukan penguatan. Sementara itu, dimensi adaptasi berjalan efektif dalam penyediaan sarana dan prasarana pendukung, namun peningkatan kapasitas sumber daya manusia belum sepenuhnya merata. Secara keseluruhan, organisasi Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya telah mampu menjalankan perannya dalam upaya penurunan stunting, meskipun masih diperlukan optimalisasi pada beberapa aspek untuk mendukung pencapaian target penurunan stunting secara lebih maksimal.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan lokasi penelitian yang hanya dilakukan pada Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya dan satu Puskesmas sebagai lokus observasi utama. Selain itu, keterbatasan waktu penelitian menyebabkan pengamatan terhadap pelaksanaan program penurunan stunting belum dapat dilakukan secara lebih mendalam pada seluruh wilayah kerja Puskesmas di Kota Palangka Raya.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari bahwa penelitian mengenai efektivitas organisasi Dinas Kesehatan dalam penurunan stunting masih dapat dikembangkan lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan kajian pada wilayah yang lebih luas atau menggunakan pendekatan komparatif antar daerah guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas organisasi pemerintah daerah dalam penurunan stunting.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh informan yang telah bersedia memberikan data dan informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada dosen pembimbing dan seluruh pihak yang telah membantu serta mendukung pelaksanaan penelitian ini hingga dapat diselesaikan dengan baik.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Handayani, B. (2024). Efektivitas Konvergensi Program Intervensi Percepatan Penurunan Stunting di Tingkat Keluarga. *Jurnal Riset Ilmu Kesehatan Umum Dan Farmasi (JRIKUF)*, *2*(3), 143–163. https://doi.org/10.57213/jrikuf.v2i3.294

Hasnawati, H., Ramadhan, S., & Islamy H., L. O. S. (2023). Efektivitas Program Percepatan Penurunan Stunting di Kota Baubau. *Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 103–115. https://doi.org/10.55340/administratio.v12i3.1506

Ipa, M., Yuliasih, Y., Astuti, E. P., Laksono, A. D., & Ridwan, W. (2023). Stakeholders' role in the implementation of stunting management policies in Garut Regency. *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*, *11*(1), 26–35. https://doi.org/10.20473/ijha.v11i1.2023.26-35

Juniarti, N., Alsharaydeh, E., Sari, C. W. M., Yani, D. I., & Hutton, A. (2025). Determinant factors influencing stunting prevention behaviors among working mothers in West Java Province, Indonesia: a cross-sectional study. *BMC Public Health*, *25*(1), 2719. https://doi.org/10.1186/s12889-025-24078-0

Norsanti, N. (2021). Efektivitas program percepatan penurunan stunting di Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan (Studi Kasus Pada Desa Mampari dan Desa Banua Hanyar). *Jurnal Administrasi Publik Dan Pembangunan*, *3*(1), 10. https://doi.org/10.20527/jpp.v3i1.3825

Nuryani, E., & Mashur, D. (2024). Efektivitas Program Percepatan Penurunan Stunting Di UPTD Puskesmas Kilan Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu. *Sosial Simbiosis : Jurnal Integrasi Ilmu Sosial Dan Politik*, *1*(3), 330–340. https://doi.org/10.62383/sosial.v1i3.642

Rahmah, M., Sadek, M. A. A., & Hamdi, M. (2025). Implementation of policy to reduce stunting in Majene Regency, West Sulawesi Province. *J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan)*, *10*(1), 49–70. https://doi.org/10.33701/j-3p.v10i1.4618

Rashid, M., Rahman, M., Siddiqi, N. A., Islam, R., Miah, S., Roy, T. K., & Rahman, M. (2026). Spatial distribution and predictors of stunting, wasting, and underweight among under-five children in Bangladesh. *BMC Public Health*, *26*(1), 1504. https://doi.org/10.1186/s12889-026-26793-8

Sufri, S., Iskandar, I., Nurhasanah, N., Bakri, S., Jannah, M., Rajuddin, R., Nainggolan, S. I., Sirasa, F., & Lassa, J. A. (2024). Implementation outcomes of convergence action policy to accelerate stunting reduction in Pidie district, Aceh province, Indonesia: a qualitative study. *BMJ Open*, *14*(11), e087432. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2024-087432

Supranoto, Sasmito, L., Indriastuti, S., Prayitno, H., & Sawir, M. (2025). From parallel to partnership governance: Strengthening institutional synergy for stunting reduction in decentralized

Indonesia. *Social Sciences & Humanities Open*, *12*, 102051. https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2025.102051

Tahir, M. I., Simanjuntak, T. H., & Maisondra, K. (2024). The Contribution of Government Expenditure in improving the Human Development Index and Reducing Stunting Prevalence: An Indonesian Perspective. *Evolutionary Studies in Imaginative Culture*, 680–691. https://doi.org/10.70082/esiculture.vi.723

Tahir, M. I., Martini, A., Gunawan, A. A. N., Makbul, Y., Yossa, N., Wiryanto, W., Fahrudin, M., & Ilyas, R. (2025). Can digital transformation improve the transparency and accountability of Indonesian public governance? *International Journal of Data and Network Science*, *9*(3), 689–700. https://doi.org/10.5267/j.ijdns.2024.7.009

Tahir, M. I., Yusca, A. Z. A., Achmad, M., & Masrich, A. (2025). A Policy Implementation Model in Decentralised Governance: Human Development in West Bandung Regency. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, *9*(2), 580–596. https://doi.org/10.24198/jmpp.v9i2.63982

Wargadinata, E. L. (2026). Ruralite Acceptance on Artificial Intelligence Technology on Stunting Prevalence Reduction. *Journal of Trends and Challenges in Artificial Intelligence*, *3*(1), 1–12. https://doi.org/10.61552/jai.2026.01.001

Zizi, A. A., Ayunatasya, & Samosir, L. (2023). Efektivitas Program Percepatan Penurunan Stunting Di Kepulauan Riau. *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial*, *4*(2), 50–59. https://doi.org/10.46730/japs.v4i2.105